BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam sumber penerimaan pajak. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Peran pajak akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Hasil penerimaan pajak akan memiliki peranan penting untuk membiayai pembangunan negara, seperti sistem demokrasi yang menganut prinsip ,dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu pun dengan pajak, dibayarkan oleh rakyat dan hasilnya dipergunakan untuk rakyat. Dengan demikian, sumber pembiayaan pembangunan dari sektor perpajakan kembali menjadi andalan pemerintah.

Dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi undang-undang nomor 16

tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (official assessment system) menjadi pemberian wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (self assessment system), maka memberikan tingkat pengaruh yang tinggi bagi wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah sebagai lawenforcement agent, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Untuk mengoptimalkan.

Penagihan pajak, salah satunya dapat dilakukan dengan tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009). Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penagihan pajak. Syahab (2012) dan Sari (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penagihan pajak.

Penagihan pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Diupayakan agar setiap wajib pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak setelah ditagih pun belum memenuhi penagihan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menagih dengan surat paksa sesuai dengan hukum perpajakan. Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Saat ini Pemeriksaan Pajak , Penagihan pajak masih belum terlaksanakan dengan baik masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh untuk membayar kewajiban membayar pajak, rendahnya pemeriksaan yang kurang efektif, dan penagihan yang tidak terlaksanakan dengan sepenuhnya. Fakta nya masih banyak kasus yang berhubungan dengan pemeriksaan, penagihan, dan penerimaan pajak mulai dari kasus Pemeriksaan Pajak 2015 menyebutkan ada piutang pajak yang belum kadaluwarsa senilai Rp 23,53 Triliun, ini merupakan potensi tambahan penerimaan pajak. Ketua pemeriksaan mengatakan, Piutang Pajak itu semestinya ditindaklanjuti dengan penagihan sampai tuntas. Dengan demikian, piutang bisa menjadi tambahan penerimaan pajak. Apalagi tahun ini realisasi penerimaan pajak meleset di bawah target.

Piutang Pajak yang belum kadaluwarsa mencapai Rp 23,53 Triliun. Namun, sejauh ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum menagihnya secara

memadai. Piutang itu terdiri atas tiga kelompok, kelompok pertama terdiri atas 5,450 Milyar ketetapan pajaknya senilai Rp 1,43 Triliun yang belum ditagih, kelompok kedua Piutang Pajak yang meliputi 11,411 Milyar ketetapan pajak senilai Rp 11,5 triliun yang belum dilakukan penyitaan, kelompok ketiga Piutang Pajak yang mencangkup 12,167 Milyar ketetapan pajak senilai Rp 10,59 triliun untuk kelompok terakhir ini DJP sudah menerbitkan Surat Penyitaan, namun pelunasannya belum optimal.

Tabel 1.1

Piutang Pajak

Kelompok	Ketetapan Pajak	Piutang Pajak
1	Rp 1,43 Triliun	Rp 5.450.000.000
2	Rp 11,5 Triliun	Rp 11.411.000.000
3	Rp 10,59 Triliun	Rp 12.167.000.000

Utang pajak yang sudah kadaluwarsa, mencapai Rp 14,68 triliun. Ini antara lain mencangkup 62.668 Milyar ketetapan pajak senilai Rp 3,34 triliun yang periode kadaluwarsa jatuh pada 2015, sampai batas waktu itu, DJP tidak melakukan upaya penagihan seperti dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Adapun fenomena yang pada kenyataannya kondisi krisis global mengakibatkan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011-2015 mengalami penurunan yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun tidak

mencapai target, terkecuali pada tahun 2011 penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian Persentase %
2011	Rp.581,587,605,178	Rp.595,870,359,786	102.46%
2012	Rp.678,437,898,771	Rp.640,899,199,941	94.47%
2013	Rp.688,044,909,461	Rp.627,825,158,229	91.25%
2014	Rp.776,189,399,535	Rp.702,565,090,916	90.51%
2015	Rp.1,068,904,392,795	Rp.906,729,678,308	84.83%

Sumber : KPP Bojonagara

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2011 target penerimaan pajak tercapai bahkan berada di atas target yang ditentukan, tetapi tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor yang sulit untuk dihindari. Disebabkan oleh terjadinya penyimpangan akibat pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak tidak tercapai dan dibawah potensi sebenarnya. Permasalahan penerimaan pajak yang rendah bukan merupakan permasalahan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih merupakan permasalahan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan Penyebab penurunan realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target hal ini disebabkan banyaknya

tunggakan atau piutang wajib pajak yang belum tertagih. Karena itu otoritas pajak diperlukan untuk melakukan beberapa tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak untuk menghindari ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas yang di tetapkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penagihan pajak. Penagihan pajak juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana masyarakat maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“ PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ” (Studi kasus KPP Bojonagara dan Tegallega)**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana pemeriksaan Pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega Kota Bandung.
2. Bagaimana Penagihan Pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega Kota Bandung.
3. Bagaimana Penerimaan Pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang penelitian yang telah duraikan, maka tujuamn dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega.
2. Untuk mengetahui penagihan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Bojonagara dan Tegallega.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak yang ditindaklanjuti dengan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Bojonagara, serta sarana bagi peneliti untuk menerapkann dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pemeriksaan pajak dengan penagihan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada dua KPP Bojonagara dan tegallega yaitu penelitian pada KPP Bojonagara Jl. Ters. Prof. Dr. Sutami No.2 Bandung. Waktu Penelitian pada Bulan Mei 2016 sampai dengan selesai. Dan KPP Tegallega Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Waktu Penelitian pada Bulan 2 juni sampai dengan selasai.